

# ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021-2022

An. Nagita Amadea Haryu  
NPP. 31.0615

Asdaf Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah  
Program Studi Keuangan Publik  
Email: annagitaamadia@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd., MM

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Regional financial independence is an important issue in regional autonomy to ensure community welfare and sustainable development, however regional dependence on transfer funds from the center is still relatively high. **Purpose:** The aim of this research is to analyze the level of regional financial independence, inhibiting factors and efforts made to increase regional financial independence in Palangka Raya City. **Method:** This research uses qualitative methods with a descriptive approach and financial theory ratio analysis (Mahmudi 2019). Data collection was carried out through semi-structured interview techniques (11 informants) and documentation. **Results:** The findings obtained by the author in this research are that the regional financial independence ratio of Palangka Raya City is still relatively low, with a consultative relationship pattern. The effectiveness of PAD management reaches a very effective level but the regional financial dependency ratio is very high, the degree of fiscal decentralization is low. Tax effectiveness is in the effective category. The degree of contribution of BMD is still low. The debt to income ratio increased from the previous year. Factors inhibiting regional financial independence in Palangka Raya City include the lack of local government efforts to increase public awareness of paying taxes and levies, suboptimal use of natural resources, incompetent quality of human resources and inadequate infrastructure. Efforts have been made by the Palangka Raya City government to increase regional financial independence, namely socializing taxpayers to the community, improving digital-based service systems, regional cooperation evaluation meetings in the context of strategies for optimal use of natural resources, training to increase employee competency, and increasing the budget to improve facilities and infrastructure. **Conclusion:** Palangka Raya City cannot yet be categorized as an independent region because dependence on central funds is still high and PAD is relatively small compared to transfer funds to finance its government system. To increase the financial independence of the City of Palangka Raya, it is recommended to diversify sources of income, optimize taxes and natural resources, increase the efficiency of financial management, and strengthen community involvement in the financial decision-making process.

**Keywords:** Independence Analysis, Regional Finance, Regional Original Revenue

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Kemandirian keuangan daerah merupakan isu penting dalam otonomi daerah guna menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, namun ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat masih relatif tinggi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis rasio teori keuangan (Mahmudi 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semi terstruktur (11 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya masih tergolong rendah, dengan pola hubungan konsultif. Efektivitas pengelolaan PAD mencapai tingkat yang sangat efektif namun rasio ketergantungan keuangan daerahnya sangat tinggi, derajat desentralisasi fiskal kategori rendah. Efektivitas pajak masuk kategori efektif. Derajat kontribusi BMD masih rendah. Rasio hutang terhadap pendapatan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Faktor-faktor penghambat kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya yakni, kurangnya upaya pemda dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, kualitas sumber daya manusia yang belum kompeten dan sarana prasarana yang kurang memadai. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, yakni sosialisasi wajib pajak kepada masyarakat, peningkatan sistem pelayanan berbasis digital, rapat evaluasi kerja sama daerah dalam rangka strategi pemanfaatan SDA secara optimal, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, serta penambahan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana. **Kesimpulan:** Kota Palangka Raya belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang mandiri sebab kergantungan terhadap dana pusat masih tinggi dan PAD yang relatif kecil jika dibandingkan dengan dana transfer dalam membiayai sistem pemerintahannya. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan Kota Palangka Raya, disarankan untuk diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi pajak retribusi dan SDA, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, dan penguatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan.

**Kata Kunci:** Analisis Kemandirian, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kemandirian keuangan daerah merupakan isu penting dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Dalam upaya menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah harus memiliki kemandirian keuangan yang memadai.<sup>1</sup> Kemandirian keuangan daerah tercermin dari perbandingan PAD dengan transfer dari pusat. Peningkatan signifikan PAD menunjukkan peningkatan kemandirian yang dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat. Sebaliknya, jika bantuan pusat (seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) lebih besar dari PAD, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah masih bergantung pada dana transfer pusat dan belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang mandiri.<sup>2</sup>

Karakteristik utama dari daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang memadai, hal tersebut menunjukkan bahwa daerah harus memiliki

<sup>1</sup> Riswanda Imawan dan Agus Wahyudin. 2014. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012*. Accounting Analysis Journal, 3.2, 147–55 <<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>>. Hlm. 148

<sup>2</sup> Konstantinus Pati Sanga dan Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng. 2023. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur*. Journal on Education, 5.2, 2721–28 <<https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.916>>. Hlm. 2722-2723



wewenang untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang tersedia di wilayahnya sendiri untuk mendukung pengelolaan keuangan dalam membiayai aktivitas pemerintahannya. Penting untuk mengurangi ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat, sehingga PAD dapat menjadi sumber utama keuangan.<sup>3</sup>

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian daerah, pemerintah menerapkan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal, yaitu pengalihan wewenang fiskal dari pusat ke daerah. Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya keuangan melalui regulasi dan kebijakan pertumbuhan pendapatan. Sebagai hasil dari tanggung jawab yang diberikan kepada daerah, desentralisasi fiskal membutuhkan sumber daya finansial yang besar. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan dan upaya untuk mencapai keseimbangan finansial antara pemerintah pusat dan daerah guna mendanai tanggung jawab keduanya.<sup>4</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Tingkat kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal dapat diukur melalui besarnya PAD yang berhasil diperoleh. Peningkatan PAD berdampak pada kelancaran pembangunan di daerah, mencakup pembangunan infrastruktur publik, perbaikan jalan, serta pembangunan dalam berbagai sektor lainnya. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah.<sup>5</sup>

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kemandirian keuangan di Kota Palangka Raya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat dari tabel anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Kota Palangka Raya tahun 2021-2022 berikut ini.

**Table 1.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021-2022**

Akun	2021			2022		
	Anggaran/Pagu	Realisasi	%	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.138,17M</b>	<b>1.258,73 M</b>	<b>110,59</b>	<b>1.142,78 M</b>	<b>1.296,02 M</b>	<b>113,41</b>
<b>PAD</b>	<b>196,77 M</b>	<b>289,39 M</b>	<b>147,07</b>	<b>184,55 M</b>	<b>276,97 M</b>	<b>150,08</b>
Pajak Daerah	117,28 M	114,63 M	97,74	134 M	131,36 M	98,03
Retribusi Daerah	15,17 M	10,83 M	71,41	15 M	12,60 M	84,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6,95 M	6,97 M	100,29	8,05 M	7,99 M	99,26
Lain-lain PAD yang Sah	57,37 M	156,95 M	273,58	27,49 M	125,02 M	454,57
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>899,04 M</b>	<b>932,70 M</b>	<b>103,74</b>	<b>946,59 M</b>	<b>1.008,42 M</b>	<b>106,53</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	814,40 M	837,78 M	102,87	861,79 M	881,43 M	102,28
Dana Perimbangan	806,09 M	829,48 M	102,90	854,32 M	873,96 M	102,30
Dana Insentif Daerah (DID)	8,30 M	8,30 M	100,00	7,47 M	7,47 M	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	84,64 M	94,92 M	112,15	84,79 M	126,98 M	149,76
Pendapatan Bagi Hasil	84,64 M	94,92 M	112,15	84,79 M	126,98 M	149,76
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>114,38 M</b>	<b>131,55 M</b>	<b>115,01</b>	<b>11,63 M</b>	<b>10,63 M</b>	<b>91,36</b>
Pendapatan Hibah	3,00 M	1,27 M	40,90	3,00 M	0,88 M	29,65

<sup>3</sup> Abdul Halim. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 253

<sup>4</sup> Pratiwi Subianto dan Irawan Irawan. 2022. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Kota Palangka Raya*. *Edunomics Journal*, 3.1, 31–43 <<https://doi.org/10.37304/ej.v3i1.4005>>. hlm. 31

<sup>5</sup> Yuniar Sri Hartati, Frengki Ullo dan Charlota Stella Kakisina. 2023. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Monokwari*. Hlm. 55

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39,35 M	35,39 M	89,95	8,63 M	9,74 M	112,80
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.282,20 M</b>	<b>1.169,73 M</b>	<b>91,23</b>	<b>1.434,69 M</b>	<b>1.294,26 M</b>	<b>90,21</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.046,06 M</b>	<b>959,54 M</b>	<b>91,73</b>	<b>1.089,94 M</b>	<b>970,86 M</b>	<b>89,07</b>
Belanja Pegawai	579,87 M	525,26 M	90,58	568,17 M	536,42 M	94,41
Belanja Barang dan Jasa	441,56 M	413,59 M	93,67	489,43 M	408,57 M	83,48
Belanja Bunga	2,87 M	0,97 M	34,06	6,40 M	4,81 M	75,16
Belanja Hibah	19,25 M	18,26 M	94,86	24,53 M	19,82 M	80,80
Belanja Bantuan Sosial	2,50 M	1,44 M	57,96	1,40 M	1,21 M	86,90
<b>Belanja Modal</b>	<b>221,56 M</b>	<b>201,01 M</b>	<b>90,73</b>	<b>341,83 M</b>	<b>322,03 M</b>	<b>94,21</b>
Belanja Modal Tanah	2,61 M	2,40 M	91,96	0,30 M	0,25 M	86,63
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,74 M	49,38 M	95,44	77,97 M	67,26 M	86,27
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76,39 M	73,61 M	96,36	84,29 M	81,26 M	96,41
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90,13 M	75,01 M	83,22	178,95 M	172,95 M	66,65
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,67 M	0,60 M	89,11	181,51 M	122,81 M	99,22
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>14,32 M</b>	<b>8,93 M</b>	<b>62,34</b>	<b>2.906,36 M</b>	<b>1.370,96 M</b>	<b>47,17</b>
Belanja Tidak Terduga	14,32 M	8,93 M	62,34	2.906,36 M	1.370,96 M	47,17
<b>Belanja Transfer</b>	<b>0,24 M</b>	<b>0,24 M</b>	<b>99,32</b>	<b>486,68 M</b>	<b>485,00 M</b>	<b>99,65</b>
Belanja Bantuan Keuangan	0,24 M	0,24 M	99,32	486,68 M	485,00 M	99,65

Sumber : BPKAD Kota Palangka Raya

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi belanja dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 10,64%. Namun PADnya justru mengalami penurunan sebesar 4,29%. Realisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih tergolong rendah, yakni hanya sebesar 22,97% ditahun 2021 dan 21,98% ditahun 2022 dengan total penurunan sebesar 2,96%. Realisasi kontribusi PAD terhadap belanja juga tergolong rendah dengan nilai persentase 24,71% pada 2021 dan 21,39% ditahun 2022. Realisasi PAD jika dibandingkan dengan dana transfer maka akan terlihat selisih yang signifikan, jika diinterpretasikan yakni 1:3 ditahun 2021 dan 1:3,64 ditahun 2022.

Adanya permasalahan ketergantungan daerah pada dana dari pemerintah pusat menyiratkan persepsi masyarakat bahwa pemerintah daerah mengalami kendala dalam mengoptimalkan potensi lokal karena PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan, antara lain struktur pendapatan, belanja daerah, kebijakan perpajakan, sektor ekonomi potensial, dan upaya diversifikasi perekonomian.

Kota Palangka Raya memiliki potensi besar dalam sumber daya alam, termasuk hutan tropis alami yang menyediakan kayu, non-kayu, dan peluang ekowisata. Kota ini juga memiliki beberapa sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, sumber daya ikan, dan tempat wisata alam serta olahraga air. Lahan subur di Palangka Raya cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, karet dan kelapa. Keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk spesies langka seperti orangutan dan berbagai jenis burung, menjadikan kota ini ideal untuk pengembangan ekowisata dan konservasi lingkungan.

Namun potensi SDA yang belum dapat dikelola secara maksimal menjadi salah satu faktor penghambat dalam pertumbuhan PAD. Pemanfaatan SDA secara optimal dapat meningkatkan pemasukan daerah. Kota Palangka Raya juga memiliki keterbatasan sumber pendapatan yang andal, seperti industri pariwisata yang belum berkembang dan ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. PAD Kota Palangka Raya berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, parkir, air tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>6</sup>

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penulisan dari penelitian ini berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan referensi namun memiliki beberapa perbedaan. Penelitian penulis menggunakan

<sup>6</sup>Pratiwi Subianto dan Irawan, *Op. Cit.* hlm. 31-33.



tujuh analisis rasio keuangan dalam teori Mahmudi (2019) untuk menganalisis kemandirian keuangan, penelitian penulis juga membahas terkait faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya dengan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ullo, et, al., 2023) dengan judul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari hanya menggunakan metode analisis data rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal. Dari hasil penelitiannya, kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Manokwari masih sangat rendah. Nilai rasio desentralisasi fiskal hanya mencapai 7,25%. Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Oki, et, al., 2020) dengan judul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian Oki,et,al menggunakan teori Mahmudi (2010) dengan menerapkan tiga analisis rasio keuangan yang meliputi rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Tujuan dari penelitian Oki, et, al., untuk mengetahui seberapa besar kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Belu masih sangat rendah. Penelitian sebelumnya oleh (Sanga & Jaeng, 2022) dengan judul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Konstantinus menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian Sanga&Jaeng ini hanya menggunakan satu rasio Mahmudi (2019) yakni rasio kemandirian keuangan daerah, dengan hasil penelitian menunjukkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Flores Timur sangat lemah dengan model hubungan instruktif. Penelitian yang dilakukan oleh (Syam & Zulfikar, 2022) dengan judul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian tersebut menggunakan teori Halim dengan hasil penelitian menunjukkan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kaimana sangat rendah. Rasio kemandirian hanya sebesar 3,82%, rasio ketergantungan mencapai rata-rata 95,67%. Tingkat desentralisasi fiskal 3,67%, efektivitas pengelolaan PAD 111,54% dengan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 63,63%. Penelitian oleh (Woestho, et, al., 2020) dengan judul Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto, menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif serta regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan dua jenis analisis data, pertama, melihat rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah, kedua melihat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kemandirian sangat rendah, tingkat kemampuan keuangan daerah juga sangat kecil, hasil dari analisis regresi linier berganda, termasuk uji-t dan uji F, menunjukkan bahwa baik rasio kemandirian keuangan daerah maupun rasio kemampuan keuangan daerah memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rante et, al., 2022) dengan judul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020, Yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian Rante et, al menggunakan lima rasio Mahmudi, yakni rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan masih rendah. Tingkat ketergantungan keuangan daerahnya melebihi 70%. Akan tetapi, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi PAD telah mencapai tingkat yang efisien.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, dengan menggunakan tujuh dari sepuluh analisis rasio keuangan dalam teori Mahmudi (2019). Pemilihan tujuh rasio didasarkan pada rasio yang dianggap paling relevan dan penting dalam konteks



penelitian tentang kemandirian keuangan daerah. Pemilihan ini didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan penelitian, serta ketersediaan data yang memadai untuk mendukung analisis mendalam terhadap rasio-rasio tersebut. Pada penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Oki, et, al., hanya menggunakan tiga analisis rasio keuangan yang meliputi rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menambahkan empat rasio yang memperkuat hasil penelitian, yaitu rasio efektifitas PAD, efektifitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD dan utang terhadap pendapatan yang belum pernah digunakan dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan analisis tetapi juga memberikan perspektif baru dalam mengevaluasi kemandirian keuangan daerah.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan dan untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Palangka Raya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menganalisis data menggunakan empat tahapan khusus dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Analisis data adalah langkah penting dalam penelitian yang membantu peneliti menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti dan mengambil kesimpulan yang relevan. Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pegawai BPKAD, serta data sekunder dari LRA dan LKPD Kota Palangka Raya.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Kepala Sub Bidang Kas Umum Daerah dan Transfer Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, (BPKAD) Kota Palangka Raya, Kepala Sub Bidang Monitoring Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang terletak pada fokus penelitian dan lokus. Berdasarkan dengan penelitian ini peneliti mengambil judul sesuai dengan permasalahan dan kesenjangan yang terjadi yaitu Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palangka Raya. Dalam menganalisis kemandirian keuangan di Kota Palangka Raya, penulis menggunakan teori dari Mahmudi dengan menggunakan tujuh analisis rasio keuangan. Adapun

pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana suatu daerah bergantung pada sumber dana eksternal, seperti transfer dari pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman, dalam hal keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.<sup>7</sup>

Rumus yang digunakan untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

**Table 2.**  
**Rasio Kemandirian**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN TRANSFER	KEMANDIRIAN %	KATEGORI
2021	289.399.107.673,39	932.708.549.556,81	31,03%	Rendah
2022	276.970.679.295,13	1.008.421.628.847,70	27,43%	Rendah
<b>TOTAL</b>	<b>566.369.786.968,52</b>	<b>1.941.130.178.404,51</b>	<b>29.23%</b>	<b>Rendah</b>

Sumber: Data diolah dari LRA Kota Palangka Raya Tahun 2021-2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kemampuan kemandirian keuangan Kota Palangka Raya masih termasuk kategori rendah dengan pola hubungan konsultif. Penurunan kemandirian keuangan Kota Palangka Raya dari tahun 2021 sebesar 31.03% ke tahun 2022 turun menjadi 27.43% menunjukkan bahwa selama periode tersebut, Kota Palangka Raya lebih banyak mengandalkan pendapatan transfer daripada PADnya dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

### 3.2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima daerah dengan total pendapatan keseluruhan daerah tersebut. Rasio ketergantungan keuangan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu daerah bergantung pada penerimaan dana dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan keuangan daerah dalam perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut: <sup>8</sup>

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

<sup>7</sup> Marja Sinurat, Ihwan Sudrajat, dan Komedi. 2023. *Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pekanbaru*. JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik), 10.2. 216–32. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3922>. Hlm. 228

<sup>8</sup> Mahmudi, *Op. cit.* Hlm. 140



**Table 3.**  
**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH %	KRITERIA KETERGANTUNGAN
2021	932.708.549.556,81	1.258.734.512.188,20	74%	Sangat Tinggi
2022	1.008.421.628.847,70	1.296.024.933.960,28	80%	Sangat Tinggi
<b>TOTAL</b>	<b>1.941.130.178.404,51</b>	<b>2.554.759.446.148,48</b>	<b>77%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber: Data diolah dari LRA Kota Palangka Raya Tahun 2021-2022

Kriteria ketergantungan terbagi menjadi 6 kategori yaitu persentase 0-10 artinya kriteria sangat rendah, persentase 10-20 artinya kriteria rendah, kemudian persentase 20-30 artinya kriteria cukup rendah selanjutnya persentase 30-40 artinya sedang. Apabila rasio ketergantungan >50% maka ketergantungan daerah tersebut sangat tinggi.<sup>9</sup> Berdasarkan data tersebut, penilaian ketergantungan keuangan daerah Kota Palangka Raya pada periode tahun 2021-2022 menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kota Palangka Raya masih belum mampu mencapai tingkat kemandirian dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dengan rata-rata rasio derajat ketergantungan mencapai 77%, hal ini menegaskan bahwa ketergantungan Kota Palangka Raya terhadap pemerintah pusat sangatlah tinggi.

### 3.3. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi kemampuan wilayah dalam melaksanakan desentralisasi. Rasio ini juga mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD untuk mendukung otonomi daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah PAD dengan total pendapatan daerah.<sup>10</sup> Berikut adalah rumus yang digunakan sebagaimana dijabarkan oleh Mahmudi.

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Table 4.**  
**Rasio Derajat Desentralisasi**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO DERAJAT DESENTRALISASI %	KRITERIA DERAJAT DESENTRALISASI
2021	289.399.107.673,39	1.258.734.512.188,20	22,97%	Cukup
2022	276.970.679.295,13	1.296.024.933.960,28	21,98%	Cukup
<b>TOTAL</b>	<b>566.369.786.968,52</b>	<b>2.554.759.446.148,48</b>	<b>22,48%</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: Data diolah dari LRA Kota Palangka Raya Tahun 2021-2022

<sup>9</sup> Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 188

<sup>10</sup> Marja Sinurat. 2020. *Analysis of Financial Performance of Regional Governments in Indonesia: A Case Study in Bekasi City, 2015-2017*. 12.6. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1283>. Hlm. 2890



Berdasarkan data Penilaian Derajat Desentralisasi Kota Palangka Raya tahun 2021-2022, terlihat bahwa terjadi penurunan dalam derajat desentralisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021, derajat desentralisasi mencapai 22,97%, sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 21,98%. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam tingkat otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah di Kota Palangka Raya.

### 3.4. Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas adalah perbandingan yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan daerah yang telah direncanakan jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.<sup>11</sup> Menurut pendapat Mahmudi, rumus untuk menghitung rasio efektivitas pengelolaan PAD adalah sebagai berikut.<sup>12</sup>

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**Table 5.**  
**Rasio Efektivitas PAD**

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	RASIO EFEKTIVITAS PAD %	KRITERIA EFEKTIVITAS PAD
2021	196.779.561.426,00	289.399.107.673,39	147,07%	Sangat Efektif
2022	184.554.414.691,00	276.970.679.295,13	150,08%	Sangat Efektif
<b>TOTAL</b>	<b>381.333.976.117,00</b>	<b>566.369.786.968,52</b>	<b>148,575%</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: Data diolah dari LRA Kota Palangka Raya Tahun 2021-2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas PAD meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022. Efektivitas ditahun 2021 menyandang kriteria sangat efektif dengan presentase 147,07%, begitu pula ditahun 2022 dengan presentase sebesar 150,08%. Kota Palangka Raya telah berhasil mencapai efektivitas maksimal dalam pencapaian target PAD selama periode 2021-2022. Komitmen untuk mencapai target tercermin dalam upaya proaktif. Langkah-langkah holistik dan progresif terus dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam pencapaian target PAD yang ditetapkan.

### 3.5. Rasio Efektivitas Pajak

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.<sup>13</sup> Rumus dari rasio ini sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

<sup>11</sup> Fahriansyah Syam dan Ahmad Zulfikar. 2022. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana*. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2.2, 98–114

<<https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>>. Hlm. 109

<sup>12</sup> Mahmudi, *Op. cit.* Hlm. 141

<sup>13</sup> Mahmudi. *Op. Cit.* Hlm. 142

**Table 6.**  
**Rasio Efektivitas Pajak**

TAHUN	TARGET PAJAK	REALISASI PAJAK	RASIO EFEKTIVITAS PAJAK %	KRITERIA EFEKTIVITAS PAJAK
2021	117.283.246.658,00	114.635.746.584,98	97,74%	Efektif
2022	134.000.000.000,00	131.364.248.668,75	98,02%	Efektif
<b>TOTAL</b>	<b>251.283.246.658,00</b>	<b>245.999.995.253,73</b>	<b>97,88%</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: Data diolah dari LRA Kota Palangka Raya Tahun 2021-2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas pajak daerah di Kota Palangka Raya pada tahun 2021-2022 masuk dalam kategori efektif dengan nilai persentase pada tahun 2021 sebesar 97,74% dan meningkat ditahun 2022 menjadi 98,02%. Nilai persentase rata-rata selama 2 tahun tersebut juga masuk dalam kategori efektif dengan nilai persentase sebesar 97,88%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil meningkatkan efektivitas kebijakan pajak daerah selama periode tersebut. Sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk menetapkan kebijakan pajak yang efektif guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

### 3.6. Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah

Kinerja pinjaman daerah dapat dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan. Rasio utang terhadap pendapatan daerah bermanfaat bagi pihak eksternal terutama calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mengembalikan pinjaman. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Utang terhadap Pendapatan} = \frac{\text{Total Utang Pemerintah Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

**Table 7.**  
**Rasio Utang terhadap Pendapatan**

TAHUN	TOTAL UTANG PEMERINTAH DAERAH	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO UTANG TERHADAP PENDAPATAN(%)
2021	43.615.221.961,20	1.258.734.512.188,20	3,47%
2022	120.587.692.594,05	1.296.024.933.960,28	9,30%
<b>TOTAL</b>	<b>164.202.914.555,25</b>	<b>2.554.759.446.148,48</b>	<b>6,39%</b>

Sumber: Data diolah dari LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021-2022

Berdasarkan data rasio utang terhadap pendapatan daerah Kota Palangka Raya, pada tahun 2021 rasio ini adalah 3,47%, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 9,30%. Rata-rata rasio untuk kedua tahun



tersebut adalah 6,39%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam beban utang pada tahun 2022, secara keseluruhan pendapatan daerah masih cukup besar untuk menutupi utang yang relatif kecil. Namun pemerintah kota perlu tetap waspada terhadap peningkatan utang ini, tetapi pada saat yang sama, pendapatan yang memadai memberikan dasar yang kuat untuk mengelola kewajiban keuangan tersebut.

### 3.7. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan PAD. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung Derajat Kontribusi BUMD.<sup>14</sup>

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Table 8.**  
**Rasio Derajat Kontribusi BUMD**

TAHUN	PENERIMAAN BAGIAN LABA BUMD	TOTAL PENERIMAAN PAD	RASIO LABA BUMD(%)
2021	6.971.131.372,00	289.399.107.673,39	2,41%
2022	7.995.266.580,00	276.970.679.295,13	2,89%
<b>TOTAL</b>	<b>14.966.397.952,00</b>	<b>566.369.786.968,52</b>	<b>2,65%</b>

Sumber: Data diolah dari LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021-2022

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio laba BUMD terhadap PAD Kota Palangka Raya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, rasio tersebut adalah 2,41%, yang kemudian naik menjadi 2,89% pada tahun 2022. Rata-rata rasio selama dua tahun tersebut adalah 2,65%. Meskipun terjadi peningkatan, namun penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan jenis penerimaan PAD lainnya di Kota Palangka Raya.

### 3.8. Faktor Penghambat Kota palangka Raya untuk Menjadi Daerah yang Mandiri dari Hasil Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

#### a. Masih Kurangnya Upaya Pemda dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak dan Retribusi

Banyak masyarakat dan pihak swasta yang belum menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak dan retribusi, terutama karena keterbatasan sarana dan prasarana di BPKAD Kota Palangka Raya untuk mengoptimalkan tugasnya. Untuk meningkatkan kesadaran, dilakukan sosialisasi, jemput bola, dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk polisi pamong praja, lembaga perbankan, dan aparat jaksa. Tindakan hukum oleh jaksa diterapkan ketika wajib pajak yang telah diberi peringatan berulang kali tetap tidak patuh.

<sup>14</sup> Mahmudi. *Op. Cit.* Hlm. 143

b. Sumber Daya Alam yang Belum Mampu Termanfaatkan secara Optimal oleh Pemerintah Daerah  
Penggunaan teknologi yang masih kurang dalam pemanfaatan SDA, kurangnya pengembangan industri pengelolaan SDA yang dapat menghasilkan produk setengah jadi atau bahan jadi adalah beberapa faktor utama yang menghambat pengoptimalan SDA di Kota Palangka Raya, seperti perkebunan, hutan dan perairan. Hal ini menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pemanfaatan SDA yang optimal dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang Kompeten

Kurangnya keterampilan teknologi, terutama di antara pegawai yang lebih tua di BPKAD Kota Palangka Raya, yang masih mengandalkan dan terbiasa dengan metode manual dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman teknologi dan keterampilan SDM secara menyeluruh guna mengoptimalkan proses kerja dan mendukung pencapaian target pendapatan daerah.

d. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Sarana dan prasarana di BPKAD Kota Palangka Raya masih belum memadai berdasarkan pegawai yang melaksanakan tugas dan ruang lingkup di BPKAD Kota Palangka Raya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kekurangan dan kerusakan pada beberapa fasilitas penting seperti komputer, printer, scanner, wifi, LCD projector, kamera CCTV, whiteboard, sistem alarm, dan ruang rapat. Kekurangan ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada belum mampu mendukung operasional yang optimal.

### **3.9. Upaya yang telah dilakukan Kota Palangka Raya agar menjadi Daerah yang Mandiri**

a. Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah tahun 2023 dalam Rangka Strategi Pemanfaatan SDA secara Optimal

Evaluasi kerja sama daerah ini merupakan pendekatan inovatif yang dapat meningkatkan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembangunan daerah. Tujuan dari rapat evaluasi kerja sama daerah ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja sama daerah guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan manfaat dari kebijakan, rencana program, atau kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan juga merencanakan program dan kegiatan kerja sama daerah yang berkelanjutan, efektif, efisien, bermanfaat bagi kemajuan wilayah dan untuk peningkatan kerja sama antar daerah, serta memperkuat perekonomian dan daya saing daerah melalui mekanisme kerja sama daerah.

b. Mengadakan Pelatihan guna Meningkatkan Kompetensi Pegawai BPKAD Kota Palangka Raya

Masih banyak pegawai BPKAD Kota Palangka Raya masih belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, pada tahun 2023, pihak STAN atau Kementerian Keuangan memberikan bimbingan teknis kepada para pegawai tersebut dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja BPKAD Kota Palangka Raya. Pemerintah Kota Palangka Raya mengadakan pelatihan teknis terkait proses pemungutan pajak. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pegawai di BPKAD Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas-tugas terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pungutan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, maka pemerintah daerah melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang kontribusi mereka dalam pembangunan melalui pembayaran pajak retribusi. Pemda secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui seminar ke setiap kelurahan dan penyuluhan langsung di tempat-tempat umum seperti gereja dan tempat pengajian untuk memberikan informasi tentang kewajiban pajak, manfaatnya bagi pembangunan daerah, dan prosedur pembayaran yang benar. Selain sosialisasi, pemda juga meningkatkan sistem pelayanan berbasis digital seperti aplikasi pajak daerah online bernama V-TAX



dan sistem pembayaran pajak melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebab mereka percaya bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan seringkali terkait dengan sistem pemungutan manual yang tidak praktis dan memakan waktu.

e. Menambahkan Anggaran untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana

BPKAD Kota Palangka Raya dalam rencana kerja tahun 2023 meningkatkan sarana dan prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.639.786.722,00. Ini menunjukkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

### **3.10. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya selama dua tahun terakhir memiliki rata-rata 29,23%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya memiliki kemandirian keuangan yang rendah berdasarkan kriteria pola kemandirian keuangan daerah pola hubungan konsultif. Kota Palangka Raya memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian keuangannya dengan mengurangi derajat rasio ketergantungan dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal serta memperbaiki sistem pemungutan pajak retribusi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rante et, al, (2022) yang hasil penelitiannya menyatakan tingkat kemandirian yang rendah dengan rata-rata kriteria 25-50%.

Perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Palangka Raya pada periode 2021-2022, menghasilkan rata-rata sebesar 77% yang artinya ketergantungan daerah tersebut sangat tinggi. Sejalan dengan penelitian oleh Oki, et, al., (2020) yang hasil penelitiannya memiliki tingkat ketergantungan yang juga sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 84,29%.

Derajat desentralisasi fiskal Kota Palangka Raya mencapai rata-rata 22,48% yang masuk kategori sedang, sedangkan dalam penelitian sebelumnya yang menggunakan perhitungan derajat desentralisasi, semua hasilnya selalu kurang, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ullo, et, al., (2023) yang mana rasio derajat desentralisasi di lokus penelitian tersebut hanya mencapai 7,25% dengan kategori sangat kurang.

Rasio Efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mencapai rata-rata 148,575%, yang masuk dalam kategori sangat efektif. Kebijakan yang konsisten dan responsif terhadap kondisi ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan pasca pandemi, memainkan peran penting dalam mencapai pengelolaan PAD yang efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syam & Zulfikar (2022), mengindikasikan bahwa hasil analisis efektivitas PAD mencapai rata-rata 111,54% yang masuk kategori sangat efektif dalam pengelolaannya.

### **3.11. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti mengidentifikasi empat faktor utama yang menghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya. Pertama, kurangnya upaya pemda dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kedua, sumber daya alam yang belum mampu termanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Ketiga, kualitas sumber daya manusia yang kurang kompeten. Keempat, sarana dan prasarana yang belum memadai.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Pemerintah Daerah telah mengambil beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi rapat evaluasi kerja sama daerah tahun 2023 dalam rangka strategi pemanfaatan SDA secara optimal, mengadakan pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai BPKAD Kota Palangka Raya, sosialisasi dan meningkatkan sistem pelayanan berbasis digital, menambahkan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana di BPKAD Kota Palangka Raya.

#### IV. KESIMPULAN

Kota Palangka Raya belum dapat dikategorikan sebagai daerah mandiri berdasarkan analisis rasio keuangan. Rasio Kemandirian Keuangan hanya sebesar 29,23%, tergolong rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rasio Efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mencapai rata-rata 148,575%, yang sangat efektif. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 22,48%, termasuk kategori cukup, sementara Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 77% menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi. Rasio Efektivitas Pajak mencapai rata-rata 97,88%, tergolong efektif. Derajat kontribusi BMD masih rendah dengan nilai rata-rata 2,65%, dan rasio hutang terhadap pendapatan rata-rata 6,39%. Faktor penghambat kemandirian daerah meliputi kurangnya upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi, pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, kualitas sumber daya manusia yang belum kompeten, dan belum memadainya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palangka Raya untuk mencapai kemandirian antara lain: sosialisasi wajib pajak kepada masyarakat, meningkatkan sistem pelayanan berbasis digital, melaksanakan rapat evaluasi kerja sama daerah pada tahun 2023 untuk strategi pemanfaatan SDA secara optimal, mengadakan pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai di BPKAD, serta menaikkan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian yang dilakukan hanya 10 hari kerja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bahan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada peningkatan kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya, sehingga memungkinkan ditemukannya wawasan yang lebih mendalam. Peneliti menyarankan agar studi lanjutan dilakukan di lokasi yang sama, terkait dengan kemandirian di Kota Palangka Raya, untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Mengingat potensi yang dimiliki oleh Kota Palangka Raya, diharapkan kemandirian keuangannya dapat meningkat di masa depan.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh anggota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Palangka Raya yang merupakan senior peneliti yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta.

##### Jurnal Dan Skripsi

- Imawan, Riswanda dan A. Wahyudin. 2014. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012". *Accounting Analysis Journal*, 3.2, <<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>>.
- Oki, Kamilaus Konstase, Frederic W Nalle, dan Pricilia A V Meomanu, "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu Analysis of Regional Financial Independence Belu Regency",



- Juni, 5.2 (2020), 1–6 <<http://jurnal.unimor.ac.id/JEP>>.
- Ullo, F., C. S. Kakisina dan Y. S. Hartati. 2023. "*Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Monokwari*". DOI: <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.223>.
- Roychana, Hafida, "*Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020*", Universitas Gadjah Mada, 2022) <<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>>.
- Sanga, K. P dan W. M. Y. Jaeng. 2023. "*Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur*", Journal on Education, 5.2 <<https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.916>>.
- Sinurat, Marja. 2020. "*Analysis of Financial Performance of Regional Governments in Indonesia: A Case Study in Bekasi City, 2015-2017*". <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1283>.
- Sinurat, Marja, Ihwan Sudrajat dan Komedi. 2023. "*Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pekanbaru*". JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik), 10.2, 216–32. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3922>
- Subianto, P dan Irawan. 2022. "*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Kota Palangka Raya*". Edunomics Journal, 3.1 <<https://doi.org/10.37304/ej.v3i1.4005>>.
- Syam, F dan A. Zulfikar. 2022. "*Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana*". Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2.2 <<https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>>.
- Woestho, Choireol, Ari Sulistyowati, dan Rycha Kuwara Sari, "*Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto*", Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 6.2 (2020), 182–91 <<https://doi.org/10.35906/jep01.v6i2.625>>

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah